



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SUROHADIKUSUMO NO 1 PEMALANG

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050.24/127/2021

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut peraturan tersebut pada huruf b, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang T;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran pembangunan Tahun 2022.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atas kondisi pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
Pada tanggal 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2021-2026. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.



Pemalang, 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
i KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR/2020.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	I
1.2 Landasan Hukum.....	I
1.3 Sistematika penulisan.....	I - 5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra OPD.....	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II - 14
2.3 Evaluasi Pelaksanaan SPM.....	II - 32
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II - 35
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal OPD.....	II - 38
BAB III Tujuan, Sasaran ,Pogram dan Kegiatan	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III - 10
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	III - 12
3.3 Program dan Kegiatan OPD.....	III - 17
BAB IV Penutup.....	I-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 Komunikasi dan Informatika.....	II -02
Tabel 2.2 Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD, Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Pemalang.....	II -05
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.....	II -27
Tabel 2.4 Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika.....	II - 34
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Pemalang.....	II - 40
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Kabupaten Pemalang.....	III- 21

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pemalang
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah – dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang – bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat perihal latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat perihal evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan OPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan PD, memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : Penutup

1.4. Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 antara lain adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
3. Menyediakan acuan resmi bagi OPD dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
2. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
3. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja OPD;
4. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang kepada pemerintah dan LKPJ kepada DPRD;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Secara de facto Dinas Komunikasi dan Informatika ada sejak dilantiknya Para Pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 3 Januari 2017.

Tahun 2022, merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang periode 2021-2026. Sekaligus tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 12 program dengan 61 kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 16.871.201.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.469.514.604 sehingga capaian realisasi adalah sebesar 97,62 %.

Sedangkan untuk Pendapatan, dari 1 rekening pendapatan dengan total target anggaran pendapatan sebesar Rp 50. 000.000,00 realisasi pendapatan adalah sebesar Rp. 50.478.728 sehingga capaian realisasi pendapatan adalah 100.96 %.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

- I. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/ operasional, realisasi 80.87%
 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,realisasi 0 (refokucing)
 3. program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, realisasi 0 (refokucing)
 4. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Komunikasi publik melalui dialog interaktif, realisasi 72.86%
 5. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Pengelolaan program radio dan televise daerah untuk masyarakat, realisasi 83.79%
- II. Realisasi Program Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi 99.99%
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, realisasi 88.83%
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi 99.44%
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan, realisasi 99.93%

- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, realisasi 98.96%
 - f. Penyediaan alat tulis kantor, realisasi 99.64%
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi 99.82%
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kator, realisasi 99.43%
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, realisasi 99.70%
 - j. Penyediaan makanan dan minuman, realisasi 99.91%
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah, realisasi 93.28%
 - l. Penyediaan jasa keamanan, realisasi 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional, realisasi 100%
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, realisasi 98.72%
 - c. Pengadaan mebeler, realisasi 98.81%
 - d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya, realisasi 100%
 - e. pengadaan alat-alat elektronik, realisasi 97.47%
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, realisasi 89.66%
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, realisasi 96.80%
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler, realisasi 93.88%
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya, realisasi 99.66%
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik, realisasi 99.81%
 - k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, realisasi 98,16 %
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi 99.28%
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, realisasi 99.88%
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, realisasi 99,87%
 - d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, realisasi 98,17%
4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Penyusunan data base perencanaan SKPD, realisasi 98,69%
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD, realisasi 99.98%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- a. Pengadaan alat studio dan komunikasi, realisasi 99.83%
 - b. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, realisasi 89.43%
 - c. Pemeliharaan alat studio dan komunikasi,realisasi 99.67%
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, realisasi 94.71%
 - e. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi, realisasi 95.28%
 - f. Penyelenggaraan ekosistem Smart City, realisasi 98.39%
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai, realisasi 97.82%
 - h. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah, realisasi 98.56%
 - i. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi, realisasi 99.95%

6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - a. Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik, realisasi 97.34%
 - b. Asistensi/ bimbingan teknis bidang analisis data 97.21%
 - c. Sosialisasi kehumasan bagi aparaturn pemerintah kabupaten pemalang, realisasi 99.40%
7. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, realisasi 91.19%
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi 99.94%
 - c. penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, realisasi 90.17%
8. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - a. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah, realisasi 98.96%
 - b. Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center, realisasi 99.66%
 - c. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik, realisasi 98.20%
9. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
 - a. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll, realisasi 99,53%
 - b. Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD, realisasi 99.40%
 - c. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial), realisasi 99.69%
 - d. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah, realisasi, 98.99%
10. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, realisasi 96.05%
 - b. Pengelolaan data statistik daerah, realisasi 98%
11. Program Pengembangan Data / Informasi Persandian
 - a. Pengamanan komunikasi dan informasi, realisasi 93.27%
 - b. Penyelenggaraan keamanan Informasi 96,88 %

III. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/ukuran yang direncanakan.

Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ukuran yang direncanakan tidak ada

IV. Faktor penyebab tidak tercapainya target terpenuhinya atau melebihi target

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
- b. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Tidak tercapainya target capaian kinerja tentunya berimplikasi terhadap target capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Beberapa target kinerja yang tidak tercapai mengakibatkan beberapa target capaian program juga tidak tercapai.

VI. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengambil langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan
- b. Mengusulkan penambahan sumberdayamanusia
- c. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2.2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya adalah :

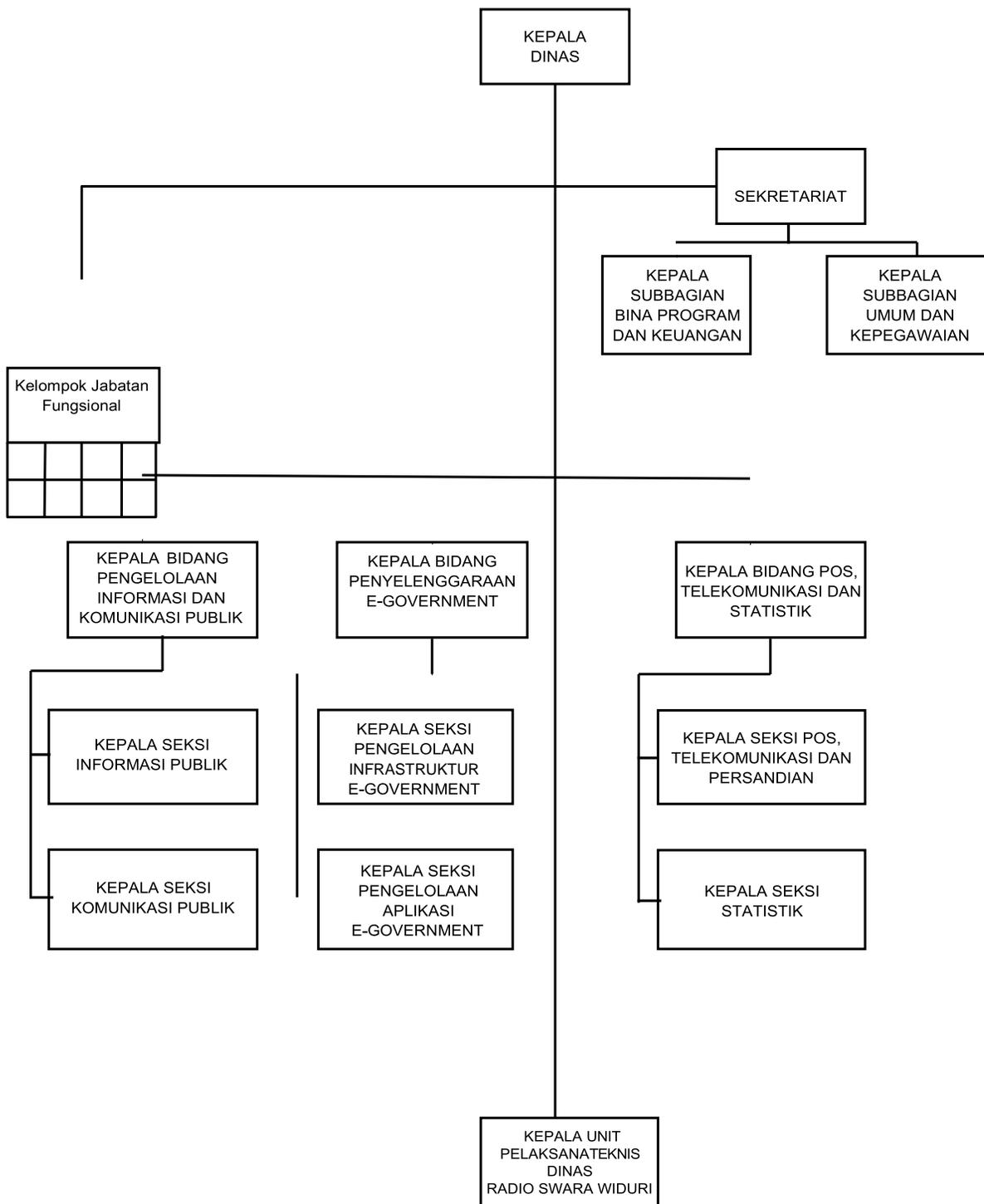
- a. Bidang Komunikasi dan informatika.
- b. Bidang Persandian.
- c. Bidang Statistik

2.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a. Seksi Informasi Publik,
 - b. Seksi Komunikasi Publik,
4. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 - a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 - b. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
5. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 - a. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 - b. Seksi Statistik,
6. UPTD,
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja;
10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaankegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan Kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaantugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internalkegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayananpublik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaantugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
- 11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaankegiatan,
3. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,

4. mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
5. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
6. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban,
7. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
8. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
9. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan
12. informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
2. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
3. mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
4. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
5. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
6. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kebijakan sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
7. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
8. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,

9. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. menyusun konsep inovasi urusan pemerintah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
5. melaksanakan pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan

6. Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,
7. melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
8. melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
9. melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
10. melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
11. melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
12. menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengelolaan komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,
5. melaksanakan kegiatan audit komunikasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
6. melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kerjasama,
7. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komunikasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
8. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,

9. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
10. melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
11. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
12. menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai raian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government*,
6. Melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. Menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran akses informasi,
8. Melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government*,
9. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyalarsan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemerintah Daerah,
10. Menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyalarsan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
5. Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Government*,

6. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,
7. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan integrasi aplikasi,
8. Melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *SmartCity*,
9. Melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
10. Melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
11. Melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
12. Menyusun rancangan inovasi di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

5. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standardisasi dan perizinan pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pelayanan publik;
5. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan komunikasi sandi dan pengamanan informasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan persandian,
6. Melaksanakan pengelolaan keamanan informasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,
8. Mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. Melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
 - i. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
 - ii. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
11. Melaksanakan pengelolaan materil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
12. Melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
 - i. Mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integritas dan ketersediaan data,

13. Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,
14. Menyusun rancangan inovasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Mengidentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
4. Menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
5. Melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
6. Melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
7. Menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
8. Mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
9. Mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
10. Menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2020 Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Berdasarkan struktur:

Jumlah Struktural:

Eselon II/B	: 1 orang
Eselon III/A	: 1 orang
Eselon III/B	: 3 orang
Eselon IV/A	: 8 orang

Jumlah Pelaksana:

Pelaksana	: 28 orang
-----------	------------

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari:

Pembina Tingkat I (IV/c)	: 1 orang
Pembina (IV/b)	: 1 orang
Pembina (IV/a)	: 3 orang
Penata Tingkat I (III/d)	: 7 orang
Penata (III/c)	: 1 orang
Penata Muda Tingkat I (III/b)	: 13 orang
Penata Muda (III/a)	: 5 orang
Pengatur Tingkat I (II/d)	: 5 orang
Pengatur (II/c)	: 4 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	: 1 orang
Pengatur Muda (II/a)	: - orang

Berdasarkan pendidikan :

Sarjana Strata 2 orang	: 4
Sarjana Strata 1/Diploma IV	: 9 orang
Diploma III	: 2 orang
SLTA	: 16 orang

Sedangkan Tenaga/Pegawai kontrak (THL) pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Petugas fotografer	: 5 orang
2. Petugas Administrasi Kantor orang	: 4
3. Petugas Penyiar Radio orang	: 3
4. Marketing radio orang	: 3
5. Penjaga server orang	: 8

6. Programmer orang	: 5
7. Penjaga gedung radio	: 1 orang
8. Petugas Teknikal support multimedia	: 2 orang
9. Petugas PPID	: 2 orang
10. Analis Sistem	: 2 orang
11. Petugas Kebersihan	: 3 orang
12. Operator Komputer	: 8 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika cukup representatif, dimana 80 % pegawai bergolongan III, dan 40 % berpendidikan SLTA.

2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel, peralatan video teleconference, Data center. Selain itu juga beberapa unit komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, Gedung LPPL Swara Widuri, dan bangunan hotspot area.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas, Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Sarana dan Prasana Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer PC	159 unit
2	Laptop	69 unit
3	LCD/proyektor attachment	25 unit
4	Telepon	15 unit
5	Televisi	20
6	AC unit	72
7	AC Split	17
8	Almari besi	15
9	Almari kayu	14
10	Almari kaca	12
11	Meja Kerja Eselon II	3
12	Meja Tulis	48
13	Meja Telephone	3
14	Meja Reseptionist	9
15	Meja Komputer	98
16	Meja Biro	171

17	Meja Rapat	66
18	Meja Operator	6
19	Meja Tamu eselon II	3
20	Meja Tamu eselon III	12
21	Kursi Besi (metal)	39
22	Kursi Kayu Bambu	33
23	Kursi Rapat	132
24	Kursi Tangan	39
25	Kursi Putar	24
26	Kursi Biasa	222
27	Kursi Lipat	30
28	Genset	6
29	Mesin bor lainnya	3
30	Avometer SU	6
31	Mesin TIK manual	21
32	Mesin Fotokopi	3
33	Rak Besi (metal)	12
34	Rak Kayu	12
35	Filling Cabinet	31
36	Kendaraan Roda-4 (stasiun wagon)	27
37	Kendaraan Roda-2	35
38	Brankas	3
39	Papan Visual	3
40	Alat Penghancur kertas	6
41	Papan Tulis	15
42	White board	9
43	Mesin absensi	3
44	Overhead Proyektor	3
45	Alat kantor lainnya	19
46	Zice	6
47	Sofa	6
48	Jam mekanis	3
49	Lemari es	6
50	Kipas angin	12
51	Kompas gas	3
52	Amplifier	6
53	Loudspeaker	18
54	Sound Sistem r	3
55	Wireless	22
56	Mikropone	16
57	Step Up/Down	6
58	Kamera Video	18

59	Kamera video	7
60	Tustel	27
61	Kaca hias	3
62	Dispenser	11
63	Mimbar / Podium	9
64	Handy cam	9
65	Alat rumah tangga lainnya	18
66	Alat pemadam portable	6
67	Local area network (LAN)	3
68	Internet	6
69	Card reader	282
70	Hard disk	21
71	Peralatan komputer mainframe lainnya	6
72	Printer	168
73	Scanner	9
74	Monitor	21
75	Peralatan personil computer lainnya	18
76	Server	20
77	Router	3
78	HUB	9
79	Peralatan jaringan lainnya	132
80	Meja kerja pegawai non structural	9
81	Compact disk player	9
82	Headphone	114
83	Microphone wireless/mic	6
84	Unintemuptible power supply (UPS)	6
85	Battery charger	12
86	Enconder/decoder)	3
87	Digital audio tape recorder	6
88	Peralatan studio visual lain-lain	54
89	Peralatan studio video dan film lainnya	156
90	Camera elektronik	12
91	Video tape recorder stationery	3
92	Video mixer	3
93	Video switcher	3
94	Tripod camera	15
95	Lighting stand tripod	3
96	Film projector	6
97	Camera film	11
98	Lensa camera	6
99	Mixer PRC	3
100	Layar film	3

101	Lighting head body	12
102	Camera vertical	3
103	Handphone	33
104	Alat komunikasi lainnya	12
105	Megaphone	6
106	Handy talking	12
107	Unit transceiver stationary	6
108	Alat komunikasi radio HRF/FM	72
109	Unit transceiver UHV portable	90
110	Alat komunikasi social lainnya	3
111	Unit pemancar VHF/FM stationary	3
112	Unit transceiver UHV portable	3
113	Alat pemancar VHF/FM lainnya	3
114	Switcher/menara antenna lainnya	6
115	Bangunan gedung kantor permanen	9
116	Antena VHF/FM portable	15
117	Bangunan pagar keliling	3
118	Bangunan menara telekomunikasi lain- lain	36
119	Instalasi penangkal petir manual	3
120	Perangkat lunak system operasional Kamera Drone	45
121	Camera	66
122	Soil Stabilizer	54
123	Meja Kayu	3
124	Lemari sorok	3
125	Meja Bunder	3
126	Mesin penghisab debu	3
127	Kitchen Set	3
128	Peralatan jaringan lainnya	84
129	Kursi hadap depan meja pimpinan	6
130	Lemari buku untuk perpustakaan	6
131	Alat keamanan lainnya	9
132	Countaintment Boxes (Single)	399
133	Tombol Alarm Kebakaran	3
134	Pompa air	3
135	Radio	9
136	Mesin Pemetong Rumput	3
137	Tandon Air	3
138	Disk Record Player	9
139	Peralatan Studio audio lainnya (Behringer Xenyx 302)	51
140	Peralatan studio audio lainnya (Headphone AKG JBL)	36

141	Peralatan studio audio lainnya (Mixer Ashley ax8n)	3
142	Peralatan studio audio lainnya (TOA)	9
143	Peralatan studio audio lainnya (Handmade)	9
144	Peralatan studio audio lainnya (Kaiser)	9
145	Peralatan studio audio lainnya (Schneider)	39
146	Alat Studio Vidio Lainnya	78
147	Peralatan Jaringan lainnya	15

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal karena tidak mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sehingga tidak diwajibkan memiliki SPM.

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

Indikator :

1. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo hasilnya 71 %
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi hasilnya 41%
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota hasilnya 7 %
4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah hasilnya 2,4 %
5. persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah hasilnya Na
6. Tingkat keamanan informasi pemerintah hasilnya 20 %

2.6. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Pencapaian target program prioritas daerah tahun 2020 yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target jumlah titik hotspot yang terbangun 12 titik pada tahun 2020 telah tercapai 13 titik atau 108 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2020, maka telah tercapai 92,8 %. Adapun hotspot area yang telah terbangun yakni, di RTH Patih Sampun, RTH Comal, Gandulan Cullinary Center, Alun-alun Moga, Randudongkal, Pulosari, Rest Area Widuri, Watukumpul, Petarukan, Ulujami, Warungpring, Penggarit. Adapun yang hanya jaringannya saja Bodeh, Belik, dan Bantarbolang.

2.7. Evaluasi Target Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

Target Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sebesar Rp 16.871.201.000 Adapun realisasinya sebesar RP 16.469.514.604 . Anggaran tersebut untuk mendukung 12 program dan 61 kegiatan. Target anggaran Urusan Statistik sebesar RP 220.008.000 dengan realisasi sebesar Rp. 212.712.490 atau 96.68 %. Dan target Urusan Persandian sebesar Rp 332.905.000 dengan realisasi Rp 318.346.000 atau 95.63 %.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2020 masih cukup optimal dalam meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat dipenuhi antara lain :

1. Pemeringkatan/Indeks Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Tengah
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
5. Pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id dan sub domainnya
6. Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar
7. Indeks Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)
8. Ketersediaan Data Statistik terintegrasi

2. Permasalahan dan Hambatan:

Secara umum Dinas komunikasi dan informatika pada tahun 2020 menghadapi permasalahan antara lain:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kurangnya Kualitas Koneksi Jaringan, Kualitas jaringan internet di wilayah Kabupaten Pemalang tidak merata baik.
2. Kurangnya Kualitas Konten Website Pemerintah Daerah, Keberadaan website

pemerintah daerah masih dirasakan kurang terutama konten website.

3. Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi, masih terdapat aplikasi aplikasi pemerintah daerah yang belum terintegrasi.
4. Kurangnya kualitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik.
5. Kurangnya SDM dalam mewujudkan indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektrik).

2. Urusan Persandian

1. Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan Siber dan Persandian.
2. Kurangnya sarana ruangan yang standar keamanan informasi.
3. Kurangnya kesadaran aparat pemerintah di bidang Keamanan Siber
4. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

1. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memadai.
 2. Kurangnya Pemahaman OPD mengenai Statistik Sektoral
 3. Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan.
3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian dan program nasional/internasional seperti NSPK, SPM,SDGs

Masih banyaknya persoalan dan adanya indikator kinerja yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan beberapa capaian Visi dan Misi Bupati Pematang belum dapat tercapai. Demikian pula pada pencapaian IKK ada yang belum memenuhi target. Adapun terkait Indikator SDGs, ada beberapa indikator yang telah memenuhi target, antara lain:

1. Presentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi publik 72 %
 2. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi 100 %
 3. Presentase Penduduk yang terlayani mobile broadband 93,5 %
 4. Presentase penduduk yang menggunakan internet 53,5 %.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
1. Tantangan
 - Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informatika
 - Maraknya informasi hoak
 2. Peluang
 - Industri Teknologi Komunikasi dan Informatika yang semakin maju dan berkembang, menjadikan peluang masyarakat untuk mengakses informasi semakin terbuka.
 3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang untuk ditindaklanjuti
 - Kualitas koneksi jaringan perlu untuk ditingkatkan

- Kualitas Konten dan kontinuitas update informasi pada website Pemerintah kabupaten Pemalang perlu untuk ditingkatkan.

4. Integrasi aplikasi pemerintahan harus segera dilaksanakan

1.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan mendesak saat ini berkenaan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kualitas koneksi jaringan
- Kurangnya kualitas konten website Pemerintah daerah
- Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi
- Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP

Adapun permasalahan terkait Urusan statistik antara lain:

- Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan.

Permasalahan Urusan Persandian yakni:

- Belum semua OPD menggunakan persandian dalam surat menyurat.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 - 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja PD juga mendasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 – 2021. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2021 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang melayani komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Non Fisik disampaikan oleh masing-masing delegasi kecamatan pada saat Forum SKPD/Musrenbang Kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2021. Tidak Terdapat usulan dari delegasi kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan analisis kebutuhan:

**Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Pematang Jaya TAHUN 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Perio de RPJM D	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2020	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangk at Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indik atif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16								19,37 6,116 ,000				20,954,056,195					
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terwujudny a penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	9,295 ,301, 000			100 %	9,205,671,800			
2	16	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja	dok ume n	dok ume n	18 dokume n	318,5 61,50 0			18 dokumen	318,561,500			
2	16	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen IKM Jumlah Renstra dan Renja yang di susun			1 Dokume n 2 Dokume n	110,8 75,00 0	Kab. Pematang, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Memper kuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggar aan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui	Dinas Komuni kasi dan Informa tika	1 Dokumen 2 Dokumen	110,875,000	Dinas Komuni kasi dan Informa tika

2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (DPA, DPPA)				4 Dokumen	28,500,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	28,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------	---	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen LKPJ, SAKIP, LPPD).			11 Dokumen	147,386,500	Kab. Pemalang, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	11 Dokumen	147,386,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen keuangan dan laporan keuangan	dokumen	dokumen	300 dokum	en 6,120,181,000						300 dokum	en 6,170,181,000	

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai			42 orang/b	5,640,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	42 orang/b	5,690,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	-----------------------------------	----------------	--	--	------------	---------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------	---------------	----------------------------------

2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPM Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi yang disiapkan			300 Dokumen 3000 Doku	en 426,160,000 men	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	300 Dokumen 3000 Doku	en 426,160,000 men	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan akhir tahun			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan bulanan Dokumen laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan triwulan			12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	n 49,021,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	n 49,021,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	dokumen	dokumen	1 dokumen	10,000,000						1 dokumen	10,000,000	

2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Dokumen	10,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi administrasi kepegawaian	orang	orang	41 orang	465,000,000					41 orang	465,000,000	

2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli				68 baju	20,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	68 baju	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	---	--	--	--	---------	------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN			41 Pegawai	25,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	41 Pegawai	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	------------	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan				89 orang	170,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	89 orang	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2020	Prak iraa n Cap aian Targ et RKP D Tah un 202 1	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Peran gkat Daerah Penang gung Jawab	
										Targe t 2022	P agu Indik atif	Lok asi	Sum ber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasi onal					Daerah

2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			41 orang	250,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	41 orang	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum, peralatan, logistik dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	jenis	27 jenis	761,013,000					27 jenis	761,013,000	

2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	pasang jaringan listrik Perbaikan jaringan					9 unit 20 unit	80,00 0,000	Kab. Pemalan g, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggar aan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembanga n fasilitas publik, pengembanga n sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komuni kasi dan Informa tika	9 unit 20 unit	80,000,000	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	---	--	--	--	-------------------	------------	--

2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan Jumlah peralatan dan perabot kantor yang tersedia					25 jenis	24,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 jenis	24,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	-----------------------------------	---	--	--	--	--	----------	------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan				6930 dus snack dan makan	125,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6930 dus snack dan makan	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	----------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			26 jenis	122,013,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	26 jenis	122,013,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	---	--	--	----------	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli				113 Buku	20,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	113 Buku	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2020	Prak iraa n Cap aian Targ et RKPD Tah un 202 1	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Peran gkat Daerah Penang gung Jawab		
						Targe t 2022	P agu Indik atif	Lok asi	Sum ber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
										Nasi onal	Daerah							

2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang tersedia				27 jenis	130,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	27 jenis	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---------------------------	--	--	--	--	----------	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Cenderamata Jumlah Tamu yang berkunjung				300 Cinderamata 750 orang	amata 30,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	300 Cinderamata 750 orang	amata 30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--------------------------	---	--	--	--	------------------------------	---------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------

2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil rapat				30 dokumen laporan	200,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	30 dokumen laporan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2020	Prak iraa n Cap aian Targ et RKP D Tah un 202 1	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Peran gkat Daerah Penang gung Jawab				
						Targe t 2022	P agu Indik atif	Lok asi	Sum ber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasi onal	Daerah								

2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jenis dan jumlah layanan informasi yang tersedia Jenis dan Jumlah pemohon informasi publik				15 informasi 10 pemohon laporan	30,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	15 informasi 10 pemohon laporan	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang penunjang milik daerah yang tersedia	jenis		jenis	15 jenis	491,795,500					15 jenis	491,795,500	

2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	--	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						25,665,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,665,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	-----------------	--	--	--	--	--	------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan				6 jenis	118,744,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 jenis	118,744,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---------------------------------------	--	--	--	--	---------	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	---------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang tersedia			8 unit	147,386,500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 unit	147,386,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah yang tersedia	jenis	jenis	25 jenis	635,000,000					25 jenis	370,370,800	

2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Tenaga Administrasi dan operator Komputer Jumlah Surat masuk dan Keluar			4 orang/bu 5000 unit	lan 100,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 orang/bu 5000 unit	lan 100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--------------------------------	--	--	--	-------------------------	--------------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------------

2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air PDAM Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	350,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	384,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	----------------------------------	-------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------	----------------------------------

2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35,00 0,000	Kab. Pemalan g, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggar aan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembanga n fasilitas publik, pengembanga n sistem perencanaan pembangunan 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggar aan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembanga n fasilitas publik, pengembanga n sistem	Dinas Komuni kasi dan Informa tika	35,000,000	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	----------------	---	--	--	--	------------	--

2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	234,986,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis	jenis	35 jenis	493,750,000					35 jenis	618,750,000	

2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	-------------	---	---	---	----------------------------------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara			10 jenis	28,750,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 jenis	28,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--------------------	-------------------------------	--	--	----------	------------	---	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	----------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	------------	---	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	------------	----------------------------------

2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							150,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	--	-------------	---	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-------------	----------------------------------

2	16	01	2.09	1 1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					75,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penduduk yang Terpapar Informasi Publik Pemerintah DAerah	%	%	10 %	4,050,815,000						10 %	4,839,219,395	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi publik yang disediakan dan disebarluaskan	jenis	jenis	30 jenis	4,050,815,000						30 jenis	4,839,219,395	

2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen hasil monitoring aspirasi dan aduan masyarakat Dokumen hasil monitoring media massa dan media sosial			12 jumlah 12 jumlah	40,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem	Masyarakat Kabupaten Pemalang	12 jumlah 12 jumlah	30,000,000	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--------------------------------------	---	--	--	------------------------	------------	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------------	------------------------	------------	---	----------------------------------

2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	dialog interaktif radio dan televisi iklan kolom kemitraan media (media visit/gathering) jumlah iklan layanan masyarakat (advetorial) penyiaran spot press conference					21 kegiatan 2 iklan 14 iklan 900 jumlah 36 kegiatan	1,018,800,000	Kab. Pemanang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemaling	21 kegiatan 2 iklan 14 iklan 900 jumlah 36 kegiatan	1,340,680,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	------------------------	---	--	--	--	--	---	---------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	---	---------------	----------------------------------

2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah penyelenggaraan bakohumas				1 kegiatan	290,000,000	Kab. Pemanang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemanang	1 kegiatan	341,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	------------	-------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------	-------------	----------------------------------

2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	peserta bimtek dan sosialisasi SDM dibidang informasi dan komunikasi			80 peserta	220,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	80 peserta	242,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	------------	-------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------	-------------	----------------------------------

2	16	02	2.01	1 1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	fasilitasi komisi informasi daerah di kabupaten pemalang				1 kegiatan	75,00 0,000	Kab. Pemalan g, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggar aan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembanga n fasilitas publik, pengembanga n sistem perencanaan pembangunan	Masyara kat Kabupat en Pemala ng	1 kegiatan	75,000,000	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
---	----	----	------	--------	--	---	--	--	--	---------------	----------------	---	--	---	--	---	------------	------------	--

2	16	02	2.01	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	kemitraan komunitas yang terfasilitasi (kelompok informasi masyarakat / KIM, FK Metra, dan komunitas IT				18 kegiatan	320,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	18 kegiatan	387,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	--------	--	---	--	--	--	-------------	-------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	-------------	-------------	----------------------------------

2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jenis sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang tersedia jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang tersedia				4 jenis 8 unit	220,165,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	4 jenis 8 unit	242,181,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terwujudnya Aplikasi Informatika yang Dibangun	%	%	40 %		6,030,000,000						40 %	6,909,165,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan Fasilitas Publik yang terlayani jaringan intranet dan internet	titik	titik	70 titik		4,186,500,000						70 titik	5,065,665,000	

2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	akses internet publik yang terlayani OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet			18 jumlah 48 jumlah	4,186,500,000	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pematang	18 jumlah 48 jumlah	5,065,665,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terkoneksi dalam sistem penghubung layanan	aplikasi	aplikasi	56 aplikasi	1,843,500,000					56 aplikasi	1,843,500,000	

2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen tata kelola dan monev SPBE				2 dokumen	159,400,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	2 dokumen	159,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------	-------------	----------------------------------

2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	aplikasi pemerintahan yang terintegrasi			5 jumlah	602,400,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	5 jumlah	602,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	---	--	--	-------------	-------------	---	--------------------------------------	---	--	----------	-------------	----------------------------------

2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang dikembangkan peserta pelatihan aplikasi					2 aplikasi 100 peserta	304,400,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	2 aplikasi 100 peserta	304,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------	---	--------------------------------------	---	--	---------------------------	-------------	----------------------------------

2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	sistem penghubung layanan pemerintah			5 jumlah	79,400,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	5 jumlah	79,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	--------------------------------------	--	--	----------	------------	---	--------------------------------------	---	--	----------	------------	----------------------------------

2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	dokumen penguatan smart city pembangunan hotspot area			6 dokumen 2 unit	546,750,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	6 dokumen 2 unit	546,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	---	--	--	---------------------	-------------	---	--------------------------------------	---	--	---------------------	-------------	----------------------------------

2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah ASN yang memiliki kompetensi bidang TIK				50 orang	151,150,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	50 orang	151,150,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						349,796,000						349,796,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Statistik Sektoral yang Tersedia sesuai Standar	%	%	35 %		349,796,000						35 %	349,796,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Data Statistik Sektoral sesuai standar	jenis	jenis	9 jenis		349,796,000						9 jenis	349,796,000	

2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Data statistik sektoral yang dikelola			9 jumlah	167,196,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	9 jumlah	167,196,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	--	---------------------------------------	--	--	----------	-------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------	----------	-------------	----------------------------------

2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	peserta bintek statistik sektoral			50 peserta	49,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	50 peserta	49,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	-----------------------------------	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------	------------	----------------------------------

2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	cetak buku sektoral				3 jumlah	133,600,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 jumlah	133,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						292,798,000							292,798,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Persentase Konten Informasi yang Telah Diamankan	%	%	10 %		292,798,000						10 %	292,798,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis informasi yang diamankan	dokumen	dokumen	30 dokumen		292,798,000						30 dokumen	292,798,000	

					Kabupaten/Kota													
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemeliharaan dan pengadaan peralatan keamanan informasi			3 jumlah	177,549,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah	3 jumlah	177,549,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi keamanan informasi			48 jumlah	115,249,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah	48 jumlah	115,249,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
									TOTAL	20,18,710,000							21,596,650,195	

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebanyak 61 kegiatan. Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui musrenbang jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD tetap. Semua kegiatan telah mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan NSPK, serta publikasi mengenai pencegahan dan dampak balita stunting dan pandemic covid.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Visi Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", yang diwujudkan melalui pelaksanaan 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, dirumuskan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Perwujudan visi pembangunan Indonesia 2020-2024 melalui ketujuh misi sebagaimana tersebut di atas Bersama lima arahan Presiden, dilaksanakan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045. Kelima arahan Presiden tersebut adalah:

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Tema Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah " Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ", dengan prioritas pembangunan 2022 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan akibat pandemi Covid-19. Keberhasilan vaksinasi yang mulai dilakukan di tahun 2021 berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Gambaran resiko dan tantangan kerangka ekonomi makro pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pandemic Covid-19. Jumlah kasus masih terus meningkat, sementara vaksinasi diperkirakan baru selesai awal tahun 2022.
2. Pemulihan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun, masih sangat tergantung pada keberhasilan penanganan pandemic Covid-19.
3. Perubahan harga komoditas global. Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (batu bara dan CPO) akan relative terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat green recovery paska Covid-19.
4. Pemulihan dunia usaha. Sebagian dunia usaha tutup permanen atau bangrut, menyebabkan luka permanen bagi perekonomian. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan.
5. Pemulihan konsumsi domestic. Sebagian masyarakat masih menganggur dan mengalami penurunan pendapatan. Tingkat keyakinan konsumen, terutama kelas menengah masih pada tingkat pesimis.
6. Ruang terbatas stimulus fiskal dan moneter. Dari sisi kebijakan fiskal, lebarnya defisit akan berdampak pada keberlanjutan utang, sementara pada tahun 2023 defisit dituntut untuk kembali pada 3 persen PDB. Dari sisi kebijakan moneter, melimpahnya likuiditas dan permintaan agregat yang meningkat akan membatasi ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 menyiapkan landasan penting untuk ekonomi Indonesia bangkit dari Covid-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022, didorong oleh terkendalnya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari: investasi, ekspor, dan industry pengolahan. Sektor jasa

yang terkena dampak besar akibat pandemic Covid-19 akan mengalami akselerasi. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tuker rupiah yang terjaga, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilakukan, dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8 - 5,5 persen PDB.

Sasaran dan target pembangunan nasional pada tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 6,0 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen;
3. IPM menjadi 73,44 - 73,48;
4. Gini rasio pada kisaran 0,376 - 0,378;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 - 6,2 persen;
6. Nilai Tukar Petani: 102 - 104
7. Nilai Tukar Nelayan: 102 - 105
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: 26,8 - 27,1 persen

Arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 adalah:

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemic Covid-19
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif, dan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 sampai dengan RENJA ini disusun masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renstra yang ditelaah di sini adalah hal-hal dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Arus Utama RPJMN 2020 yang terkait dengan Urusan Koinfo, Statistik dan Persandian

1. Arus utama yang kedua : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator:

Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional

2. Arus Utama yang ke enam : Transformasi Digital

Indikator:

- 1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
- 2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Visi Jawa Tengah 2018-2023

“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahankabupaten/kota.
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan danpengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditujukan pada "Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM", dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3.3. Telaahan Terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat Empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. Adil,

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3. Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4. Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "*Pemalang itu ngangeni*".

b. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "**Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni**" ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Misi pertama **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Misi kedua **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang

terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

3. Misi ketiga **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

4. Misi keempat **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

5. Misi kelima **Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN)

6. Misi Keenam **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu

mengimplementasikan Visi Pembangunan Pemalang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misinya 2 (dua)** Kabupaten Pemalang yakni " *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin kesinambungan kebijakan dan program pemerintah daerah dengan Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu " *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan kualitas aparatur melalui kelembagaan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa.
3. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
4. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
5. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
6. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
7. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

Adapun arah kebijakan tahun 2022 antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
2. Penyediaan data dan informasi perencanaan
3. Penyediaan situation room perencanaan
4. Penguatan kebijakan satu data
5. Implementasi SIPD
6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
7. Peningkatan pendapatan asli daerah
8. Peningkatan kapasitas kelurahan dalam mendukung pembangunan kewilayahan
9. Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan di setiap Perangkat Daerah
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik
11. Penguatan persandian
12. Peningkatan profesionalisme ASN
13. Peningkatan kapasitas legislasi
14. Digitalisasi kearsipan dan pembangunan depo arsip
15. Meningkatkan bela Negara dan partisipasi politik, serta meningkatkan peran kelurahan dan kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pematang		Indeks SPBE	Indeks	3,35	Program Aplikasi Informatika	Persentase Network terintegrasi	78 %
	Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	Persen	78	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	73 %
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
	Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Indeks	2,3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Konten Informasi yang telah diamankan	20 %
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik		Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks/Nilai	76	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan Informasi Publik	70 %

	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen	2 %	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral yang tersedia sesuai standar	0,15 %
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
	Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	Persen	35	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	70%
						Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	10%
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	45%
Peningkatan							

kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika							
	Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	Nilai	60,5	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap pelaksanaan urusan komunikasi dan infofrmatika, statistic dan persandian	100%
		Nilai RB	Nilai	48,25	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap pelaksanaan urusan komunikasi dan infofrmatika, statistic dan persandian	100%
		IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks/Nilai	77,5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Dukungan terhadap pelaksanaan urusan komunikasi dan infofrmatika, statistic dan persandian	100%

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni)		
MISI 2	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
MISI 4	Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pemalang	1. Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Penajaman pada aspek : 1. Audit TIK 2. Penerapan Manajemen SPBE 3. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 4. Perencanaan Strategis SPBE
		2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	1. Peningkatan kapasitas sistem dan jaringan 2. Pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung SPBE/smart city
	2. Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Penerapan indeks standar keamanan informasi dan persandian	1. Penyusunan dan penerapan tata kelola keamanan informasi 2. Penerapan standar keamanan sistem Jaringan dan keamanan aplikasi
		2. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	1. Pengamanan Jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten Pemalang

			2. Mitigasi ancaman keamanan informasi	
			3. Penguatan kapasitas pengelola keamanan informasi	
2. Peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik	1. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	1. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	1. Peningkatan pengelolaan data Statistik Sektoral	
			2. Peningkatan Kapasitas produsen data	
			3. Fasilitasi produsen data dalam penyusunan data statistik sektoral	
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data statistik sektoral	Fasilitasi produsen data dalam sosialisasi pemanfaatan data statistik sektoral	
3. Mewujudkan Satu Data Indonesia	Penyusunan desain, tata kelola serta SOP berbagi pakai data			
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.	1. Peningkatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peningkatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Optimalisasi data statistik sektoral untuk penyusunan narasi tunggal	
			2. Peningkatan pengelolaan Media komunikasi Pemerintah daerah	
			3. Penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	
			4. Peningkatan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan masyarakat	
			5. Manajemen Penanganan komunikasi krisis	
			6. Fasilitasi Penyebarluasan informasi Desa Wisata (DEWI) dan Kota Industri (KOIN)	
	2. Peningkatan pelayanan informasi publik	1. Pengelolaan data dan pelayanan informasi public		
	3. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika			2. Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pembantu
				3. Fasilitasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa (DEDI)
				1. Fasilitasi ketersediaan jaringan telekomunikasi pita lebar/mobile broadband (DEWI, DEDI, DESI, KOIN)

			2. Penguatan Media Komunikasi Masyarakat
			3. Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja
			2. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kominformasi
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Penguatan kapasitas SDM
			2. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan dan kearsipan
			3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

3.4. Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2021 - 2026 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan OPD yang menjadi bidang tugas. Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, Indikator SDGs, dan NSPK.

Dari prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan Pemendagri tersebut.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan :

Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 4. Pelayanan Informasi Publik
 5. Layanan Hubungan Media
 6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 8. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 9. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 10. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Infra pemerintah Daerah
3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraa n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasion al	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16						19.376.116.000						20.954.056.195						
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	9.295.301.000			100 %	9.205.671.800			
2	16	01	2, 0 1			Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja	dokum en		dokum en	18 doku me	318,561,500			18 dokume	318,561,500			
2	16	01	2, 0 1	01		Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Dokumen IKM Jumlah Renstra dan Renja yang di susun				1 Doku men 2 Doku men	110.875.000	Kab. Pemala ng, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Mempe rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komun ikasi dan Inform atika	1 Dokume n 2 Dokume n	110.875.000	Dinas Komun ikasi dan Inform atika

2	16	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun (RKA)				4 Dokumen	31.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	31.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (DPA, DPPA)				4 Dokumen	28.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	28.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen LKPJ, SAKIP, LPPD).				11 Dokumen	147,386,500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	11 Dokumen	147,386,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen keuangan dan laporan keuangan	dokumen	dokumen	300 dokumen	6,120,181,000							300 dokumen	6,170,181,000	
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai			42 orang/b	5,640,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	42 orang/b	5,690,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

2	16	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPM Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi yang disiapkan				300 Dokum 3000 Doku	en 426,160,00 0 men	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	300 Dokum 3000 Doku	en 426,160,00 0 men	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan akhir tahun				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan bulanan Dokumen laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan triwulan				12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	n 49,021,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	n 49,021,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	dokumen	dokumen	1 dokumen	10.000.000						1 dokumen	10.000.000	
2	16	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan terhadap administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Dokumen	10.000.000		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi administrasi kepegawaian	orang		orang	41 orang	465.000.000						41 orang	465.000.000	
2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli				68 baju	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	68 baju	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN				41 Pegawai	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	41 Pegawai	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2	16	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan				89 orang	170.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	89 orang	170.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				41 orang	250.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	41 orang	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum, peralatan, logistik dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis		jenis	27 jenis	761.013.000							27 jenis	761.013.000	

2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pasang jaringan listrik Perbaikan jaringan				9 unit 20 unit	80.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	9 unit 20 unit	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan Jumlah peralatan dan perabot kantor yang tersedia				25 jenis	24.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 jenis	24.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan				6930 dus snack dan makanan	125.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6930 dus snack dan makanan	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				26 jenis	122.013.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	26 jenis	122.013.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli				113 Buku	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	113 Buku	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang tersedia				27 jenis	130.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	27 jenis	130.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Cinderamata Jumlah Tamu yang berkunjung				300 Cinderamata 750 orang	30,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	300 Cinderamata 750 orang	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil rapat				30 dokumen laporan	200,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	30 dokumen laporan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jenis dan jumlah layanan informasi yang tersedia Jenis dan Jumlah pemohon informasi publik			15 informasi pemohon laporan	30,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	15 informasi pemohon laporan	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang penunjang milik daerah yang tersedia	jenis	jenis	15 jenis	491.795.500					15 jenis	491.795.500	
2	16	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel					25.665.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		25.665.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan			6 jenis	118.744.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 jenis	118.744.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang tersedia			8 unit	147.386.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 unit	147.386.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jenis	jenis	25 jenis	635.000.000					25 jenis	370.370.800	
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Tenaga Administrasi dan operator Komputer Jumlah Surat masuk dan Keluar			4 orang/bu 5000 unit	100,000,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 orang/bu 5000 unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2, 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air PDAM Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon				12 Bula n 12 Bula n 12 Bula n	350.000.00 0	Kab. Pemala ng, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komun ikasi dan Inform atika	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	384.000	Dinas Komun ikasi dan Inform atika
---	----	----	--------------	----	--	---	--	--	--	---	-----------------	--	--	---	---	----------------------------------	---------	---

2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	------------	---	---	---	----------------------------------	------------	----------------------------------

2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		234.986.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis	jenis	35 jenis	493.750.000					35 jenis	618.750.000	
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara					10 jenis	28.750.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 jenis	28.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							40.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					75.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penduduk yang Terpapar Informasi Publik Pemerintah DAerah	%	%	10 %	4.050.815.000						10 %	4.839.219.395	
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah jenis informasi publik yang disediakan dan disebarluaskan	jenis	jenis	30 jenis	4.050.815.000						30 jenis	4.839.219.395	

					Kabupaten/Kota															
2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen hasil monitoring aspirasi dan aduan masyarakat Dokumen hasil monitoring media massa dan media sosial				12 jumlah	12 jumlah	40.000.000 ²	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	12 jumlah 12 jumlah	30.000.000 ³	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	cetak foto kegiatan produksi dan publikasi konten melalui website dan media sosial (web, instagram, twitter, youtube, facebook) dan videotron				300 cetakan 1800 berita	4 05.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	300 cetakan 1800 berita	4 90.518.270	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	film dokumenter media cetak yang diterbitkan media luar ruang video potensi daerah				2 jumlah 2100 eksem 3260 jumlah 6 jumlah	plar 1,041,850,000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	2 jumlah 2100 eksem 3260 jumlah 6 jumlah	plar 1,148,639,625	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah informasi publik yang disediakan jumlah pemohon informasi publik yang terlayani jumlah peserta sosialisasi PPID desa Jumlah sengketa informasi publik yang ditangani				30 jenis 12 pemohon 424 peserta 2 sengketa	220.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	30 jenis 12 pemohon 424 peserta 2 sengketa	242.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	dialog interaktif radio dan televisi iklan kolom kemitraan media (media visit/gathering) jumlah iklan layanan masyarakat (advetorial) penyiaran spot press conference				21 kegiatan 2 iklan 14 iklan 900 jumlah 36 kegiatan	1.018.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	21 kegiatan 2 iklan 14 iklan 900 jumlah 36 kegiatan	1.340.680.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah penyelenggaraan bakohumas				1 kegiatan	290.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	1 kegiatan	341.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	peserta bimtek dan sosialisasi SDM dibidang informasi dan komunikasi				80 peserta	220.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	80 peserta	242.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	02	2,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	fasilitasi komisi informasi daerah di kabupaten pemalang				1 kegiatan	75.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	1 kegiatan	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	kemitraan komunitas yang terfasilitasi (kelompok informasi masyarakat / KIM, FK Metra, dan komunitas IT				18 kegiatan	320.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	18 kegiatan	387.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	02	2,01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	jenis sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang tersedia jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang tersedia				4 jenis 8 unit	220.165.00 0	Kab. Pemala ng, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transf er Umum- Dana Alokas i Umum	Mempe rkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Masyar akat Kabup aten Pemal ang	4 jenis 8 unit	242.181.50 0	Dinas Komun ikasi dan Inform atika
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terwujudnya Aplikasi Informatika yang Dibangun	%	%	40 %	6.030.000.00 0							40 %	6.909.165.00 0	
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah OPD dan Fasilitas Publik yang terlayani jaringan intranet dan internet	titik	titik	70 titik	4.186.500.00 0							70 titik	5.065.665.00 0	

2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	akses internet publik yang terlayani OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet				18 jumlah 48 jumlah	4.186.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	18 jumlah 48 jumlah	5.065.665.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terkoneksi dalam sistem penghubung layanan	aplikasi	aplikasi	56 aplikasi	1.843.500.000						56 aplikasi	1.843.500.000	
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen tata kelola dan monev SPBE			2 dokumen	159.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	2 dokumen	159.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	aplikasi pemerintahan yang terintegrasi				5 jumlah	602.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	5 jumlah	602.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang dikembangkan peserta pelatihan aplikasi				2 aplikasi 100 peserta	304.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	2 aplikasi 100 peserta	304.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	sistem penghubung layanan pemerintah				5 jumlah	79.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	5 jumlah	79.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	dokumen penguatan smart city pembangunan hotspot area				6 dokumen 2 unit	546.750.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	6 dokumen 2 unit	546.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah ASN yang memiliki kompetensi bidang TIK			50 orang	151.150.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	50 orang	151.150.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					349.796.000						349.796.000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Statistik Sektoral yang Tersedia sesuai Standar	%	%	35 %	349.796.000						35 %	349.796.000	
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Data Statistik Sektoral sesuai standar	jenis	jenis	9 jenis	349.796.000						9 jenis	349.796.000	

2	20	02	2, 0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Data statistik sektoral yang dikelola				9 jumlah	167.196.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	9 jumlah	167.196.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2, 0 1	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	peserta bintek statistik sektoral				50 peserta	49.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	50 peserta	49.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	cetak buku sektoral			3 jumlah	133.600.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 jumlah	133.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					292.798.000						292.798.000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Konten Informasi yang Telah Diamankan	%	%	10 %	292.798.000						10 %	292.798.000	
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi yang diamankan	dokumen	dokumen	30 dokumen	292,798,000						30 dokumen	292,798,000	

2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemeliharaan dan pengadaan peralatan keamanan informasi				3 jumlah	177.549.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah	3 jumlah	177.549.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas keamanan informasi				48 jumlah	115.249.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah	48 jumlah	115.249.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL											20.018.710.000						21.596.650.195	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik, layanan infrastruktur komunikasi, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Urusan statistik diprioritaskan untuk penyediaan layanan satu data, dan Urusan Persandian diprioritaskan untuk layanan keamanan informasi.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda NIP.
19610821 198903 1 003

